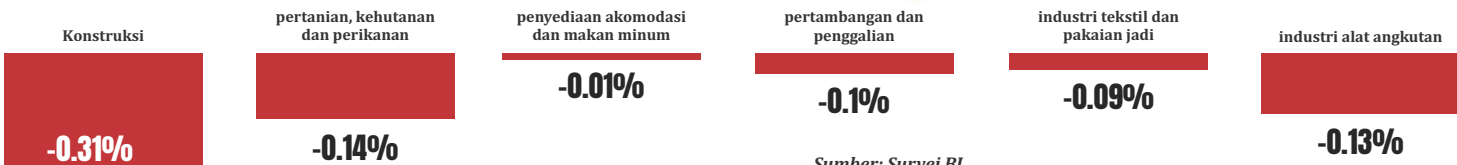


Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) periode kuartal I-2025. Kegiatan dunia usaha bak sedang tiarap, masih bergerak positif tetapi melambat signifikan. Hal ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada kuartal I-2025 sebesar 7,63%. Posisi tersebut paling rendah dalam hampir 3 tahun terakhir. Buntutnya, realisasi rekrutmen tenaga kerja di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 juga menyentuh level terendah dengan pertumbuhan hanya 0,97%. Bila melacak ke belakang, angka itu menjadi yang terendah sejak pandemi merebak pada tahun 2020. Di sisi lain, Bank Dunia memproyeksikan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 40,1 persen. Tahu depan trennya maih naik menjadi 40,8 persen dan 41,4 persen pada 2027. Angka itu juga lebih tinggi ketimbang target fiskal yang tersemat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mematok rasio utang pemerintah 39,15 persen terhadap PDB pada 2025. Ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia pun dipangkas menjadi 4,7 persen untuk 2025, turun dari prediksi sebelumnya sebesar 5 persen. Gambaran muram dan proyeksinya pun buram.

Baca Hal 11...

Realisasi rekrutmen tenaga kerja kuartal I-2025 menyentuh level terendah hanya 0,97%.



EDISI SENIN, 28 APRIL 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02

GOVERNMENT TODAY
Khusus 4 Provinsi Pelunasan Haji Diperpanjang hingga 2 Mei

05

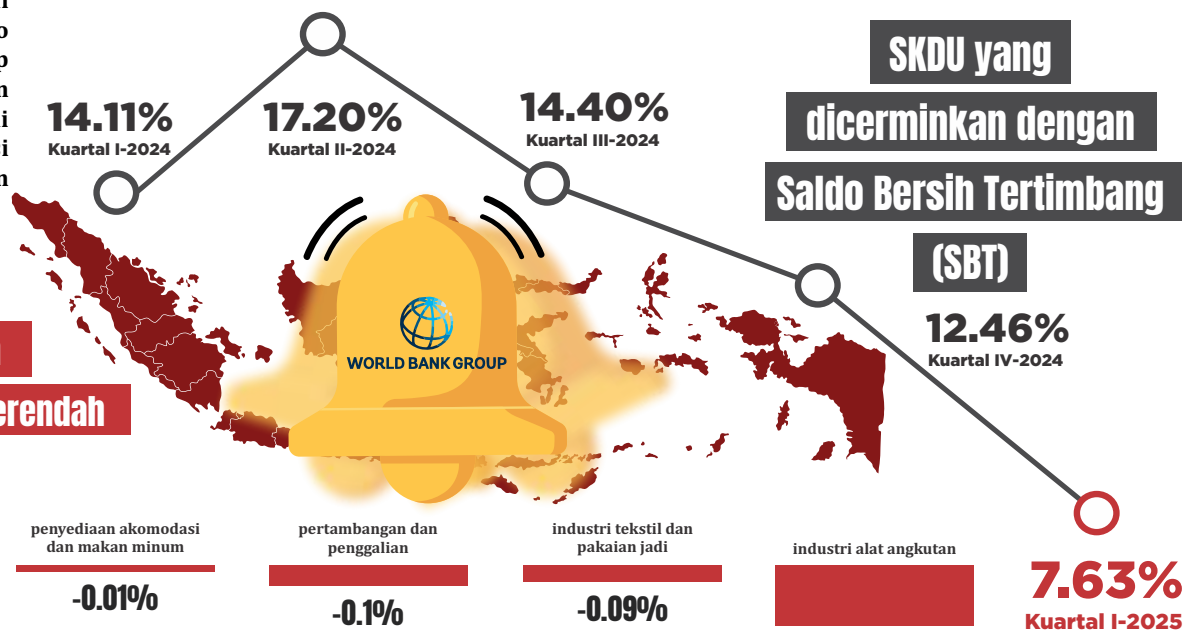
NUSANTARA
Gibran dalam Pusaran Desakan Mundur, Istana Enggan Bicara

10

LISTSTYLE
Jajanan Korea yang Cocok untuk Wisatawan Muslim

KEGIATAN DUNIA USAHA INDONESIA TIARAP

Alarm dari Bank Dunia: Risiko Jor-Joran Utang, Ekonomi Melambat

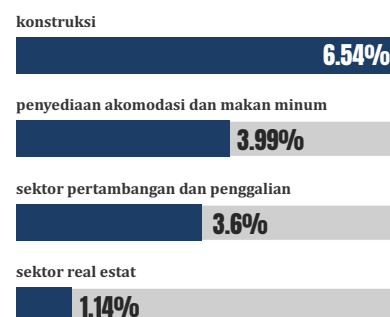


Sumber: Survei BI

Saldo Bersih (SB)

pertumbuhan upah kuartal I-2025

hanya naik 34,91%.



(Ilustrasi) Sektor konstruksi mencatat penurunan rekrutmen tertinggi dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) periode kuartal I-2025 Bank Indonesia. (ist)



Petugas merapikan kamar tidur yang diperuntukkan bagi jamaah calon haji di Asrama haji Indramayu, Jawa Barat pada 24 April 2025. (Antara)

Jamaah haji asal Indonesia mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada 2 Mei 2025. Meski demikian, khusus 4 provinsi diberi perpanjangan pelunasan hingga tanggal tersebut.

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M telah berakhir. Namun demikian, secara kewilayahan akan ada 4 provinsi yang bakal diperpanjang hingga 2 Mei mendatang.

"Kita akan kembali perpanjang pelunasan Bipih Reguler hingga 2 Mei 2025," terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain, di Jakarta seperti dikutip laman kemenag.go.id, Minggu (27/4/2025).

"Perpanjangan ini hanya dibuka untuk empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, dan Banten," sambungnya.

Selain kuota yang belum terisi semua di Jawa Barat dan Gorontalo, jamaah status cadangan yang melunasi pada empat provinsi ini juga masih perlu ditambah. Tujuannya, untuk mengantisipasi jamaah yang sudah melunasi tapi akhirnya menunda keberangkatan.

"Ada juga sejumlah jamaah yang ketentuan istitha'ah-nya (syarat kemampuan) baru terbit sehingga baru bisa melunasi. Sebab, nama mereka masuk dalam kategori jamaah berhak lunas," tegasnya.

Diketahui, hingga Jumat (25/4/2025) ada 212.733 jamaah yang telah melunasi biaya haji reguler. "Tahap perpanjangan pelunasan biaya haji reguler berakhir. Sebanyak 212.733 jamaah reguler lunasi biaya haji reguler," terang Muhammad Zain.

Mereka yang melunasi terdiri atas 184.029 jamaah berhak lunas yang telah melunasi pada tahap I maupun II, 27.500 jamaah dengan status cadangan, 1.520 Petugas Haji Daerah (PHD), dan 684 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota. Terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Untuk kuota haji

reguler, terbagi atas: 190.897 jamaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jamaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada KBIHU dan 1.572 PHD.

Muhammad Zain menjelaskan, dari sisi jumlah, jamaah reguler yang melunasi biaya haji sudah melebihi kuota nasional. Namun demikian, secara kewilayahan, hingga hari ini, masih ada dua provinsi yang belum 100 persen terserap kuotanya. Dua provinsi tersebut adalah Jawa Barat (80 kuota) dan Gorontalo (11 kouta). Selain itu, masih ada 52 kuota PHD dan satu kuota pembimbing ibadah pada KBIHU yang juga belum terisi di Sumatera Selatan dan Banten.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jamaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari

berikutnya, jamaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Diketahui, jamaah haji asal Indonesia mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada 2 Mei 2025. Seluruh persiapan layanan haji di Arab Saudi mulai dipantau.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak terbang ke Arab Saudi untuk memastikan segala persiapan layanan bagi jamaah haji Indonesia.

Dalam kunjungan yang didampingi Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Arab Saudi Nasrullah Jasam serta pejabat BP Haji, Dahnil memantau kesiapan akomodasi hotel, layanan konsumsi, hingga fasilitas kesehatan.

"Hari ini saya berada di daerah Syisyah untuk melakukan pengecekan akomodasi hotel bagi jamaah

Saudi Mulai Bagikan 150.000 Kartu Nusuk Haji yang Sudah Terbit

KEMENTERIAN Haji dan Umrah Arab Saudi mulai mendistribusikan kartu Nusuk untuk musim haji 1446 H/2025 M. Ada lebih dari 150.000 kartu telah diterbitkan dan sisanya masih diproduksi secara bertahap.

Saudi Press Agency melaporkan, Arab Saudi mampu memproduksi sebanyak 70.000 kartu Nusuk haji dalam sehari. Sama seperti tahun sebelumnya, jamaah yang melaksanakan ibadah haji wajib memiliki kartu Nusuk.

Kartu ini dicetak di Saudi dengan mengandalkan fasilitas canggih. Percetakan khusus ini memiliki standar kualitas dan keamanan yang ketat. Setiap kartu Nusuk dilengkapi dengan fitur keamanan anti-duplikasi untuk membantu petugas memverifikasi identitas dan status hukum jamaah.

Kartu Nusuk memuat informasi jamaah secara lengkap, seperti rincian akomodasi di Makkah, Madinah, dan tempat-tempat suci, beserta informasi kontak penyedia

layanan jamaah.

Kartu tersebut bertujuan untuk menyederhanakan panduan jamaah dan mengurangi kasus jamaah yang hilang karena tersesat. Kartu ini sekaligus memberikan akses ke layanan penyedia informasi.

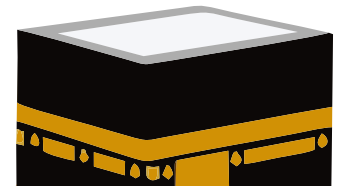
Proses pencetakan akan terus berlanjut hingga semua izin dan visa haji diterbitkan. Jamaah internasional nantinya akan menerima kartu mereka saat tiba di Tanah Suci melalui perusahaan layanan mereka. Sementara untuk jamaah haji domestik dapat mengambil kartu Nusuk dari perusahaan jasa di titik kumpul yang telah ditentukan.

Kementerian Pariwisata Saudi telah mengamankan bahwa mulai 29 April 2025 hingga akhir musim haji, semua agen perjalanan, fasilitas wisata, dan penyedia akomodasi di Makkah tidak boleh menyelesaikan pemesanan atau check-in bagi pemegang visa masuk atau penduduk. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pengunjung kecuali yang

Indonesia, tepatnya di Emaar Al Diyafa Hotel. Di hotel ini akan menampung sekitar 2.500 jamaah haji Indonesia selama berada di Makkah," terang Dahnil usai meninjau hotel, dapur, dan kantor layanan kesehatan di Makkah, Sabtu (26/4/2025), seperti dikutip dari laman Kemenag RI. (wid, rls, nag, ist/dya)

Estimasi waktu tunggu haji di beberapa provinsi:

- Provinsi Aceh perkiraan waktu tunggu 34 tahun
- Provinsi Jawa Tengah perkiraan waktu tunggu 32 tahun
- Provinsi Jawa Timur perkiraan waktu tunggu 34 tahun
- Provinsi DKI Jakarta perkiraan waktu tunggu 28 tahun
- Provinsi Kalimantan Selatan perkiraan waktu tunggu 38 tahun
- Provinsi Sulawesi Tenggara perkiraan waktu tunggu 27 tahun
- Provinsi Sulawesi Selatan perkiraan waktu tunggu 47 tahun
- Provinsi Papua perkiraan waktu tunggu 13-39 tahun
- Provinsi Maluku perkiraan waktu tunggu 11-30 tahun



memiliki visa haji yang sah atau izin resmi untuk bekerja atau tinggal selama musim haji.

Langkah ini sejalan dengan pengaturan Kementerian Dalam Negeri Saudi yang mengharuskan semua pemegang visa lainnya meninggalkan Makkah mulai 29 April 2025.

Kementerian Pariwisata Saudi juga menekankan penyedia layanan perhotelan dan platform daring harus bekerja sama dengan pihak berwenang. Perusahaan atau individu yang melanggar akan mendapat peringatan keras dan dijatuhi sanksi hukum. (din, rls, ist/dya)

DPR: Ormas Meresahkan Bisa Dibubarkan

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah memberikan ruang untuk pemerintah menertibkan ormas yang bermasalah. Diketahui, belakangan ini banyak peristiwa ormas yang bertindak kebablasan.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan pihaknya terbuka untuk membahas usulan merevisi UU Ormas bila perubahan regulasi itu genting dan diperuntukkan menguatkan kebutuhan hukum.

"Kita terbuka untuk membahasnya. Kalau pemerintah menilai hal tersebut urgen dan merupakan sebuah kebutuhan hukum," ujar Irawan, Minggu (27/4/2025).

Kendati demikian, legislator Partai Golkar ini menyampaikan, pihaknya bakal mempelajari substansi perubahan bila sudah ada usulan UU dari pihak pemerintah. "Substansi usulannya akan kita pelajari," terang Irawan.

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah memberikan ruang untuk pemerintah menertibkan ormas yang bermasalah.

"Secara substansi saya kira ketentuan dalam UU Ormas yang ada sudah memberikan ruang yang cukup kepada pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap berbagai macam ormas yang bermasalah," ucap pria yang akrab disapa Rifqi, Minggu (27/4/2025).

Selain itu, UU Ormas saat ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk membubarkan ormas yang meresahkan dalam bernegara. "Pada titik tertentu saya kira negara memiliki kewenangan untuk dapat membubarkan ormas-ormas yang bertentangan secara ideologi dengan pandangan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meresahkan kehidupan bernegara itu," ungkap dia.

Dengan adanya substansi penertiban dalam UU Ormas saat ini, Rifqi meminta agar pemerintah bertindak. "Kami minta kepada pemerintah untuk kemudian melakukan berbagai tindakan nyata karena beberapa ormas yang meresahkan itu tidak boleh diberikan ruang sedikit pun untuk kita toleransi," kata politikus Partai Nasdemini.

Dari sisi prosedur, Komisi II DPR akan menunggu usulan resmi pemerintah jika ingin merevisi UU Ormas. "Jika pemerintah menginginkan melakukan revisi maka



Suasana saat mobil yang ditumpangi polisi dibakar anggota ormas di Pondok Ranggon Cimanggis Depok pada 18 April 2025 lalu. (ist)

kami akan menunggu dan kami akan siap untuk membahas daftar inventarisasi masalah dalam revisi yang diinginkan," terang Rifqi.

Polri Diminta Menertibkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta aparat penegak hukum tanggap merespons hal-hal yang mengganggu keamanan publik. Ia menekankan pentingnya keberadaan polisi dalam menyikapi kasus yang meresahkan masyarakat ini.

"Polri harus terus hadir di tengah masyarakat untuk menenangkan hati rakyat. Masyarakat berharap polisi bisa bekerja penuh keadilan dan sigap, tidak pandang bulu, tidak perlu menunggu peristiwa viral terlebih

dahulu," ujar Evita.

"Ketika hukum dilecehkan oleh kekuatan massa yang arogan, maka yang terancam adalah rakyat, yang di dalamnya juga ada pelaku-pelaku usaha kecil. Kita menunggu ketegasan dan solusi dari pemerintah mengenai hal ini," tambahnya.

Dia menyoroti ormas yang meresahkan di publik. Dicontohkan ormas yang mengganggu dunia industri, termasuk salah satunya di Subang, Jawa Barat, hingga aksi premanisme di Depok.

Evita mengatakan banyak daerah industri, terutama di wilayah Jabodetabek, Banten, dan sebagian wilayah Sumatera, di mana ormas tertentu kerap memaksakan keikutsertaan dalam proyek-proyek

swasta. Ia menyebut ada oknum yang memungut 'uang keamanan' hingga menjadi debt collector ilegal.

"Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga membuat biaya usaha melonjak karena 'biaya tak resmi' yang sebetulnya adalah pemerasan," ujar Evita.

Evita juga menyoroti aksi premanisme pembakaran mobil oleh ormas yang dilakukan di Depok, Jawa Barat. Ia menilai tindakan yang dilakukan sudah masuk ke ranah ancaman.

"Pelaku harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Tindakan main hakim sendiri dan kekerasan terhadap aparat adalah bentuk pelanggaran hukum yang mencederai rasa aman rakyat," ungkapnya. (din, ist, ant, rls/dya))

7 PROVINSI DENGAN JUMLAH ORMAS/LSM TERBANYAK

JAWA BARAT

832

JAWA TIMUR

Sumber: Katadata

827

KALIMANTAN SELATAN

683

JAWA TENGAH

661

SULAWESI SELATAN

658

NUSA TENGGARA BARAT

399

RIAU

390

Mendagri: Banyak Ormas Kebablasan

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah bertindak kebablasan. Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito mengutip Antara, Minggu (27/4/2025).

Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat dua kasus yang melibatkan ormas. Pertama adalah pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut ormas mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Kedua adalah pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan. Menurutnya, ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi

membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.

Ia menambahkan, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, ormas tidak boleh bertindak kebablasan dengan melakukan perbuatan seperti intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan. "Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya," tegas mantan Kapolri itu.

Tito mengatakan Undang-Undang Ormas yang dirancang pascareformasi pada 1998 memang mengedepankan kebebasan sipil. Namun dalam perkembangannya, sejumlah organisasi justru menyalahgunakan status ormas untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

"Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi," ujarnya.

Kendati demikian, Tito mengatakan langkah revisi tetap harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pemegang

kewenangan. "Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan," jelas Tito.

Untuk itu, dirinya mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, baik oleh individu maupun institusi. Ia mencontohkan kasus pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindakan pidana yang harus diproses sesuai hukum. (wid, ant, rls/dya)



Sejumlah calon siswa didampingi orang tuanya saat mengantre untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (Dok. Antara)

Sistem PPDB dikatakan masih menyisakan tantangan besar, termasuk kesenjangan mutu pendidikan. SPMB diklaim menjadi langkah strategis transformasi.

Mendekati tahun ajaran baru 2025/2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Transformasi itu diklaim menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan transparan.

Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan hasil evaluasi atas pelaksanaan PPDB sejak 2017 hingga 2024. "Kami harapkan bisa selesaikan semua itu, tetapi tetap perlu mitigasi sedini mungkin supaya potensi-potensi penyimpangan, seperti proses seleksi yang tidak akuntabel dan tidak transparan, bisa dicegah," ujar Gogot dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (27/4/2025).

Gogot mengakui, sistem lama masih menyisakan tantangan besar, termasuk kesenjangan mutu pendidikan dan persepsi publik yang menganggap sekolah negeri lebih baik dan murah dibanding sekolah swasta. Kondisi ini memicu intervensi dalam proses seleksi, yang berujung pada ketidakadilan.

Melalui SPMB, jalur penerimaan murid diatur dalam empat skema: domisili, prestasi (akademik dan non-akademik), afirmasi, dan mutasi. Pada jenjang SMP dan SMA, proporsi jalur domisili dikurangi, sementara kuota afirmasi dan prestasi diperbesar.

Untuk SPMB SMP, kuota domisili minimal 40 persen, afirmasi minimal 20 persen, prestasi minimal 25 persen, dan mutasi maksimal 5 persen. Sementara untuk SMA, domisili minimal 30 persen, afirmasi minimal 30 persen, prestasi minimal 30 persen,

dan mutasi maksimal 5 persen.

"Penambahan kuota jalur afirmasi dilakukan berdasarkan data bahwa sekitar 80 persen anak yang rentan tidak melanjutkan pendidikan berasal dari keluarga tidak mampu," ujar Gogot. Jalur afirmasi ini juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

Langgar Kuota, Sanksi Menanti

Selain itu, pemerintah telah menetapkan daya tampung sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang melanggar aturan jumlah rombongan belajar (rombel) akan dikenai sanksi berupa penghentian pencairan dana Bantuan

SPMB untuk SMA, Dindik Jatim: Nilai Akademik Jadi Prioritas Utama, Bukan Jarak

KEPALA Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai mengingatkan, aturan baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 perlu dipahami masyarakat, yakni faktor jarak bukan lagi jadi prioritas utama.

"Tahun ini kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah aturan dalam penerimaan jalur domisili yang menjadi prioritas adalah nilai akademik dulu. Baru nanti jika ada calon murid baru yang nilainya sama akan dipertimbangkan melalui jarak rumah," katanya, Minggu (27/4/2025).

Aturan tersebut, kata Aries, hanya berlaku untuk SPMB jenjang SMA. Sedangkan untuk SMK, aturan baru tersebut tidak berlaku.

"Tetap menggunakan sistem lama. Artinya jarak masih menjadi prioritas dengan jumlah kuota sepuluh persen," ucapnya.

Aries mengatakan, perubahan SPMB dari PPDB memang tidak terlalu signifikan. Namun, ia

Mencermati Perubahan Sistem PPDB Menjadi SPMB

Operasional Sekolah (BOS).

Gogot Suharwoto, kuota di jalur domisili, afirmasi, dan prestasi juga berubah. Kuota jalur domisili akan dikurangi sedangkan afirmasi dan prestasi ditambah.

"Penambahan kuota jalur afirmasi dilakukan berdasarkan hasil pembahasan bersama Menteri Sosial. Dari data yang kami himpun, sekitar 80% anak yang rentan tidak melanjutkan pendidikan berasal dari keluarga tidak mampu," kata Gogot dalam keterangan resminya.

Gogot mengatakan pemerintah saat ini telah mengunci daya tampung setiap sekolah lewat sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menegaskan, sekolah yang mengubah kuota akan mendapat sanksi tidak dapat pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Jika kuota sekolah negeri sudah penuh, maka siswa yang belum tertampung akan dialokasikan ke sekolah swasta yang terakreditasi. Pemerintah juga akan membantu biaya pendidikan siswa.

Pengumuman pendaftar SPMB akan dibuat melalui pengumuman resmi di sekolah dan media lainnya. "Melalui papan pengumuman resmi satuan pendidikan media pengumuman resmi dinas pendidikan atau kementerian lainnya dan atau media masyarakat atau daring lainnya paling lama satu bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru jadi supaya ada waktu cukup untuk mendaftar," kata Gogot.

Bagi yang ingin ikut SPMB 2025, orangtua dan siswa bisa mempersiapkan diri dengan mengetahui informasi syarat penerimaan. (wid rls, ant/dya)

SYARAT UMUM SPMB 2025

- **TK**
 - Kelompok A: usia 4-5 tahun
 - Kelompok B: usia 5-6 tahun
- **SD**
 - Usia 7 tahun per 1 Juli, atau minimal 6 tahun.
 - Usia minimal 5 tahun 6 bulan jika punya kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis, dibuktikan rekomendasi psikolog atau guru.
 - Usia 7 tahun ke atas diprioritaskan.
 - Tidak ada tes membaca, menulis, berhitung.
- **SMP**
 - Usia maksimal 15 tahun per 1 Juli
 - Telah lulus SD atau sederajat
- **SMA/SMK**
 - Usia maksimal 21 tahun per 1 Juli
 - Telah lulus SMP atau sederajat
- **Bukti usia:**
 - Akta kelahiran atau surat lahir yang dilegalisasi
- **Bukti kelulusan:**
 - Ijazah atau surat keterangan lulus
- **Pengecualian usia berlaku untuk:**
 - Disabilitas
 - Sekolah khusus
 - Sekolah layanan khusus
 - Sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)

Dalam aturan SPMB tersebut, untuk jenjang SMA jalur afirmasi minimal 30 persen, jalur prestasi minimal 30 persen, jalur domisili 35 persen, dengan rincian jalur domisili reguler 20 persen dan jalur domisili sebaran 15 persen, jalur prestasi lomba lima persen, dan jalur mutasi lima persen.

Kemudian untuk jenjang SMK, kuota afirmasi sebesar 15 persen, mutasi orang tua lima persen, prestasi hasil lomba lima persen, domisili SMK 10 persen, dan jalur nilai prestasi akademik 65 persen.

Ia menjelaskan bahwa nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB yakni, nilai rapor SMP/MTs/ Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah. (lut, ssn/dya)

Gibran dalam Pusaran Desakan Mundur, Istana Enggan Bicara

Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.

Sejumlah pihak telah angkat suara soal pemakzulan wakil dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Terkini, Istana Negara juga memberikan tanggapan meski terkesan enggan. "Sudah direspon Pak Wiranto, cukup lah," kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoron saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, pada Minggu (27/4/2025).

Juri enggan menjelaskan lebih lanjut, selain merujuk pada pernyataan Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Pada Kamis (24/4/2025) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

Meski demikian, Prabowo tidak bisa serta-merta langsung menjawab karena harus mempelajari dulu isi tuntutan yang dinilai tak mudah itu. "Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Kamis.

Selain itu, Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem Trias Politika yang memisahkan lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas.

"Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden. Tentu presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu," kata Wiranto.

MPR: Sepaket dengan Presiden

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Prabowo-Gibran merupakan satu paket presiden dan wapres yang telah dipilih melalui tahapan pilpres 2024 hingga pelantikannya. Sehingga kemenangan

Prabowo-Gibran ialah sah secara konstitusional.

Muzani menyatakan meski hasil pilpres 2024 sempat digugat, Mahkamah Konstitusi pun menyatakan kemenangan pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju tidak ada masalah.

"Maka pada 20 Oktober 2024, atas keputusan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah," ucap Muzani.

Kendati demikian, ihwal apakah

tuntutan mengenai pencopotan Gibran dari jabatan wapres itu bisa mengganggu soliditas maupun jalannya pemerintahan, Muzani kembali menyebut dirinya belum mempelajari detailnya. "Saya tidak tahu bagaimana karena saya belum mempelajari," ucap dia.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai penggantian wakil presiden hanya bisa dilakukan dengan alasan yang jelas. Dia berujar hal itu mengacu

pada peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Baleg DPR ini mengatakan presiden dan wakil presiden sudah satu paket sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan. Selain itu, Doli menyebut bahwa keputusan-keputusan politik sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia. (din, ist, rls, tmo/dya)



Sekitar 300 Purnawirawan TNI Menuntut

ISTANA Wakil Presiden dalam sorotan usai Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden oleh para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Desakan datang bukan dari segelintir suara, tetapi dari gerakan besar yang disebut-sebut telah mengumpulkan lebih dari 300 purnawirawan TNI lintas matra, yang menuntut pemakzulan Gibran secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Puncak dari desakan itu diketahui terjadi pada Kamis, 17 April 2025 lalu, ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum tersebut kemudian membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya para purnawirawan TNI mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu

telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Surat itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran. Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Pengamat Militer dan Politik UNAS, Selamat Ginting, mengaku menjadi salah satu yang sempat menanyakan langsung kepada Try Sutrisno mengenai kabar Gibran dalam momen silaturahmi di kediaman wakil presiden ke-6 tersebut, pada 9 April 2025. Lalu mantan Panglima TNI ini menjawab bahwa banyak yang punya pemikiran sama dengannya soal Gibran ini.

"Saya lebih banyak berinisiatif bertanya karena memang saya rutin kalau hari-hari besar nasional

mengunjungi sesepuh bangsa. Kemudian, [saya tanya] apakah selain Pak Try itu banyak juga para purnawirawan TNI yang punya pemikiran sama [soal Gibran]? Banyak," kata Selamat menirukan jawaban Try saat itu dikutip dari kanal Youtube Hersubeno Point, Jumat (25/4/2025).

Menurut Try, ada purnawirawan yang sangat berani mengenai pencopotan Gibran, tapi ada juga yang kurang berani. Meski begitu, kata Selamat, Try menghormati semua keputusan tersebut. "Tapi saya hormati sikap-sikap itu," kata Selamat lagi menirukan ucapan Try saat itu.

Satu hal yang membuat Selamat terkejut ketika Try bicara soal posisi Wapres yang dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka. Try menilai bahwa posisi Gibran saat ini menjadi perhatian serius dan terkesan memaksakan.

"Tapi untuk Gibran itu menurut saya tidak habis pikir. Dan saya menyayangkan ada orang seperti Pak Jokowi tanpa berpikiran luas kenapa kemudian memaksakan sang anak? Dan kita harus menanggung akibatnya," ucap Selamat menirukan ucapan Try. (wid, rls, tir/dya)

Investasi Asing di Kabupaten Malang Menyusut 3 Tahun Berturut-turut

MALANG- Realisasi investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Malang mengalami tren penurunan sepanjang tiga tahun terakhir. Meski jumlah pelaku usaha dalam negeri terus meningkat, minat investor luar negeri justru melemah.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang, nilai realisasi PMA pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,24 triliun. Namun, pada 2023, angka realisasi investasi tersebut turun menjadi Rp1,53 triliun. Tren penurunan ini masih berlanjut pada 2024, dengan nilai realisasi investasi asing hanya mencapai Rp1,02 triliun.

"Kalau kita lihat data, memang ada penurunan realisasi investasi asing dalam tiga tahun terakhir," ujar Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Malang, Endah Dwi Suhesti, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Minggu (27/4/2025).

Jika melihat data pada periode 2018 hingga 2021, Kabupaten Malang sempat mencatatkan total realisasi investasi asing mencapai Rp11,32 triliun.

Endah menjelaskan, sepanjang 2024, realisasi PMA juga mengalami penurunan bertahap di setiap triwulan. Pada triwulan pertama, nilai investasi tercatat Rp631,88 miliar, lalu turun menjadi Rp182,09 miliar pada triwulan kedua, kemudian Rp131,59 miliar di triwulan ketiga, dan Rp79,86 miliar pada triwulan keempat.

Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan geliat investasi dari dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Yang meski fluktuatif, sambungnya, namun tetap menunjukkan angka realisasi yang jauh lebih tinggi.

Dikatakannya, total realisasi PMDN non Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Malang selama 2024 mencapai Rp3,14 triliun. "Dengan rincian, sebesar Rp615.589.176.795 untuk triwulan pertama 2024, triwulan kedua ada di angka Rp638.136.400.000, kemudian triwulan ketiga ada di Rp819.129.490.734, selanjutnya di triwulan keempat realisasi PMDN non UMK ada di angka Rp1.076.490.195.332," paparnya.

Menurut Endah, meski dari sisi

nilai PMA menurun, jumlah perusahaan yang aktif melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) justru meningkat. Jika pada 2023 hanya tercatat 1.024 investor yang melaporkan LKPM, maka di tahun 2024 jumlahnya naik menjadi 1.426 investor.

"Ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaporan LKPM semakin membaik. Kami juga rutin menggelar bimbingan teknis dan mengirim surat peringatan untuk memastikan kewajiban pelaporan dipenuhi," imbuhnya.

Ditambahkannya, LKPM wajib dilaporkan oleh setiap perusahaan berbadan hukum setiap triwulan, meski dalam periode tersebut tidak terjadi penambahan nilai investasi. Kewajiban ini diberlakukan khususnya bagi perusahaan dengan nilai investasi di atas Rp5 miliar.



(Ilustrasi) Perusahaan asal Jerman menjadi salah satu investor asing di Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)

Sebagai informasi, dikutip dari laman Kabupaten Malang Satu Data Berbasis Teknologi Informasi (Kamasuta Bertali) hingga akhir 2024, tercatat sebanyak 2.439 perusahaan yang menanamkan modal di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, hanya tiga perusahaan yang berstatus PMA, sementara 2.436 lainnya adalah PMDN. (Santi/Dya)

Revitalisasi Kayutangan Heritage Gunakan APBD Kota Malang, Tonjolkan Budaya Lokal



Bundaran signage koridor Zona 2 Kayutangan Heritage. (Santi/Lentera)

MALANG - Rencana revitalisasi koridor Kayutangan Heritage akan menonjolkan konsep budaya lokal. Revitalisasi ini akan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang dan diproyeksikan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi,

mengungkapkan saat ini, revitalisasi tersebut masih berupa rencana alokasi anggaran dan akan dibahas lebih lanjut pada 2026. Ia menegaskan,

penguatan konsep heritage menjadi fokus utama dalam perombakan kawasan tersebut.

"Rencana revitalisasi koridor Kayutangan Heritage itu masuk di RKPD 2026. Saya menyebutnya rencana alokasi anggaran yang akan dibahas di 2026, masih rencana karena belum tentu. Ini menindaklanjuti hasil CSR dari teman-teman Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) wilayah Malang," ujar Baihaqi, Minggu (27/4/2025).

Menurutnya, konsep revitalisasi akan dituangkan secara rinci melalui proses penyusunan Detail Engineering

Design (DED). Baihaqi menyebut, saran dari Ketua DPRD Kota Malang untuk memperkuat konsep heritage sudah sejalan dengan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

"Kami sepakat (dengan usulan Ketua DPRD). Karena memang konsepnya heritage, Kota Malang harus mengoptimalkan dan menunjukkan potensi lokal. Kota ini sudah bagus penataannya sejak zaman kolonial Belanda," katanya.

Menurut Baihaqi, banyaknya bangunan-bangunan bersejarah dan tata kota masa lalu merupakan aset berharga yang bisa menjadi daya tarik wisata. Oleh karena itu, konsep heritage dalam revitalisasi akan lebih ditonjolkan untuk menegaskan identitas Kota Malang di tengah persaingan destinasi wisata lainnya.

"Kalau bicara destinasi wisata, harus ada yang membedakan. Apa yang menjadi ikonik dari daerah kita? Kalau sama dengan daerah lain, kan kurang menarik. Jadi, budaya lokal, termasuk peninggalan gedung-gedung bersejarah, harus lebih ditonjolkan,"

tegas Baihaqi.

Diakuinya, kondisi eksisting koridor Kayutangan Heritage saat ini masih perlu penyempurnaan, terutama dalam hal penguatan nuansa ikon kota yang bersejarah. Termasuk dalam pengelolaan bisnis kuliner di sepanjang koridor, yang diharapkan lebih mengadopsi sentuhan budaya lokal.

"Bangunan-bangunan yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman perlu sentuhan heritage, supaya nanti benar-benar membedakan dari daerah lain," katanya.

Lebih lanjut, mengenai pembiayaan, Baihaqi menyebut rencana revitalisasi sementara ini akan mengandalkan APBD Kota Malang. Meski demikian, secara teknis perincian anggaran masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

"Sudah ada gambaran skema penganggarannya, tetapi detail teknisnya belum bisa saya sampaikan. Karena masih dalam proses rencana alokasi anggaran," ungkapnya. (Santi/Dya)



Dalam foto yang disediakan oleh Kantor Berita Republik Islam, IRNA, sejumlah pria menggondong seorang pria yang terluka setelah ledakan besar di dekat kota pelabuhan selatan Bandar Abbas, Iran, Sabtu, (26/4/2025). (AP)

Jumlah korban tewas akibat ledakan hebat di Pelabuhan Shahid Rajaei, Iran selatan, pada Sabtu, bertambah menjadi 25 orang, menurut laporan sumber lokal pada Minggu (27/4/2025).

Televisi Pemerintah Iran melaporkan seperti dikutip dari Anadolu bahwa sedikitnya 1.139 orang lainnya terluka dalam ledakan tersebut.

Pada Sabtu (26/4/2025), kebakaran terjadi sekitar pukul 12 siang waktu setempat di Pelabuhan Shahid Rajaei, khususnya di area dermaga peti kemas, menurut media lokal.

Laporan awal menunjukkan adanya bahan yang mudah terbakar di dekat lokasi ledakan.

Mengutip para saksi, laporan menunjukkan bahwa api kecil dengan cepat menyebar dan memicu ledakan karena panas 40 derajat Celcius dan akumulasi zat yang mudah terbakar.

NBC News melaporkan ledakan itu diduga disebabkan oleh kebakaran bahan bakar peluru rudal padat. Seseorang yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan kepada The News York Times bahwa bahan yang meledak adalah natrium perklorat, salah satu komponen utama dalam bahan bakar padat untuk rudal.

Pelabuhan tersebut menerima kiriman "bahan bakar roket natrium perklorat" pada Maret, kata firma keamanan swasta Ambrey.

"Kebakaran itu dilaporkan terjadi akibat penanganan yang tidak tepat terhadap pengiriman bahan bakar padat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam rudal balistik Iran," kata Ambrey.

Bahan bakar tersebut merupakan bagian dari kiriman dari Cina oleh dua kapal ke Iran yang pertama kali dilaporkan pada Januari oleh Financial Times.

Bahan bakar tersebut akan digunakan untuk mengisi kembali persediaan rudal Iran, yang telah habis akibat serangan langsungnya terhadap Israel selama perang dengan Hamas di Jalur Gaza.

Pelabuhan yang sangat penting secara strategis, yang terletak di provinsi Hormozgan selatan, terletak sekitar 15 kilometer barat daya pelabuhan Bandar Abbas di pantai utara Selat Hormuz.

Diketahui Kementerian Kesehatan telah mengerahkan tim kesehatan dan menerapkan langkah-langkah darurat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Warga diimbau untuk tetap berada di dalam rumah, menghindari aktivitas di luar ruangan, dan menutup jendela, menurut media resmi Iran.

Sebuah video yang disebar oleh kantor berita Mehr memperlihatkan rekaman pengawasan saat ledakan terjadi, yang tampaknya terjadi di sebuah gudang di pelabuhan. Rekaman lainnya memperlihatkan helikopter menjatuhkan air di lokasi kebakaran yang dipicu oleh ledakan tersebut.

Puing-puing berserakan di area yang luas dan banyak bangunan di kompleks pelabuhan rusak parah, menurut media pemerintah. Jendela-jendela dalam radius beberapa kilometer pecah, kata mereka.

Beberapa laporan mengatakan orang-

Bahan Bakar Rudal Diduga Picu Ledakan Pelabuhan Iran: 25 Tewas dan 1.139 Terluka

Pejabat menduga ledakan bahan kimia terjadi di Pelabuhan Bandar Abbas, pelabuhan peti kemas terbesar di Iran, dengan korban tewas mencapai 25 orang.

orang terjebak di reruntuhan bangunan yang telah menjadi puing-puing.

Sementara Gubernur wilayah tersebut, Mohammad Ashouri Taziani, mengatakan korban luka telah dipindahkan ke pusat medis Bandar Abbas. Pelabuhan telah ditutup dan operasi maritim dihentikan, menurut media pemerintah.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memerintahkan penyelidikan atas penyebab insiden tersebut. Ia menulis di X bahwa menteri dalam negeri telah dikirim ke wilayah tersebut untuk "memeriksa dimensi kecelakaan tersebut."

"Setelah menerima laporan awal dan menganalisis kemungkinan penyebab insiden tersebut," Pezeshkian menekankan perlunya melakukan "penilaian komprehensif terhadap penyebab insiden tersebut," sesegera mungkin untuk mencegah "terulangnya insiden seperti itu di masa mendatang."

Lembaga penyiaran pemerintah IRIB mengatakan ledakan itu terjadi di daerah bahan kimia dan sulfur di pelabuhan. Peristiwa ini menggemparkan negara tersebut dan banyak orang terlihat di Press TV milik pemerintah Iran mengantre di sebuah pusat kesehatan untuk menyumbang-

kan darah bagi yang terluka.

Shahid Rajaei adalah fasilitas besar untuk pengiriman peti kemas, meliputi lahan seluas 2.400 hektar (sekitar 5.900 are). Fasilitas ini menangani 70 juta ton kargo setiap tahunnya, termasuk minyak dan pengiriman umum. Fasilitas ini memiliki gudang seluas hampir 500.000 meter persegi (5,4 juta kaki persegi) dan 35 tempat berlabuh pengiriman.

Ledakan itu terjadi pada hari Sabtu (26/4/2025) di dekat Selat Hormuz, yang dilalui seperlima produksi minyak dunia.

Kantor bea cukai pelabuhan mengatakan dalam sebuah pernyataan, yang disiarkan oleh televisi pemerintah, bahwa ledakan itu mungkin disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di depot penyimpanan bahan kimia dan berbahaya.

Seseorang yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada The New York Times bahwa bahan kimia yang meledak adalah natrium perklorat, bahan utama bahan bakar padat untuk rudal. (Anadolu, NBC News, The News York Times, Al Jazeera, ist/nei)

Usai Ledakan Bandar Abbas, Putin Tawarkan Bantuan

PRESIDEN Vladimir Putin menawarkan bantuan Rusia kepada Iran untuk menangani dampak ledakan di Pelabuhan Bandar Abbas, sekaligus menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa, menurut pernyataan Kremlin pada Minggu (27/4/2025).

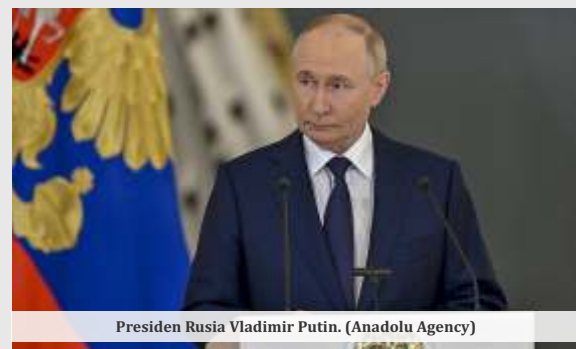
Putin telah me-nyampaikan "ucapan simpati dan dukungan yang tulus kepada ke-luarga korban, serta harapannya agar semua yang terluka segera pulih," sebagaimana ditunjukkan dalam salinan pesannya yang dipublikasikan di situs web Kremlin.

Pihak berwenang Rusia tidak mengatakan seperti apa bantuan

yang akan diberikan kepada Republik Islam itu.

Media pemerintah Iran melapor-kan bahwa ledakan besar yang mungkin disebabkan oleh ledakan bahan kimia menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai lebih dari 700 orang pada hari Sabtu di Bandar Abbas, pelabuhan terbesar Iran.

Peristiwa yang diyakini disebabkan oleh ledakan bahan kimia itu telah membayangi kawasan itu.



Presiden Rusia Vladimir Putin. (Anadolu Agency)

Pemerintah Iran terus menyelidiki penyebab pasti bencana itu, sambil bersiap menerima bantuan internasional. (Reuters, ist/nei)

Terumbu Karang Buatan Dosen ITS untuk Selamatkan Pantai

Indonesia sebagai negara tropis cenderung memiliki banyak wilayah pesisir, sehingga menyebabkan fenomena abrasi pantai pun sering terjadi. Abrasi pantai merupakan fenomena alam yang diperparah oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim, sehingga penanggulangan dan pengelolaan yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi wilayah pesisir Indonesia.

Guna mengatasi fenomena tersebut, Guru Besar ke-220 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Ir Haryo Dwito Armono ST MEng PhD IPM ASEAN Eng menginovasikan struktur pemecah gelombang dengan memanfaatkan terumbu karang buatan sebagai upaya building with nature.

Profesor dari Departemen Teknik Kelautan ITS ini menjelaskan bahwa building with nature adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan proses alami dalam perencanaan dan desain infrastruktur. Dalam hal ini, Haryo memanfaatkan terumbu karang buatan sebagai bentuk pendekatan untuk mengembalikan keberadaan terumbu karang yang kini mulai punah.

Bahkan ia menyebutkan bahwa dalam 20 tahun ke depan, 70 - 90 persen keberadaan terumbu karang di Indonesia terancam punah. Hal ini pun semakin didukung dengan adanya pemanasan global yang menyebabkan kenaikan suhu air laut.

"Jika terus dibiarkan, keberadaan ikan pun akan terancam dan hasil tangkap ikan nelayan ikut menurun," tambahnya, Kamis (24/4/2025).

Lebih lanjut, lelaki kelahiran Belitong, 10 Agustus 1968 itu



Foto: Istimewa

mengungkapkan jika efek samping pemanasan global juga menyebabkan naiknya permukaan air laut. Hal ini dapat menyebabkan bencana seperti abrasi pantai. Haryo menjelaskan, abrasi pantai disebabkan oleh hantaman ombak yang terus menerus, sehingga menyebabkan perubahan garis pantai.

"Jika tidak diatasi, abrasi pantai dapat merusak fasilitas sekaligus rumah warga yang ada di sekitarnya," ujarnya mengingatkan.

Melalui orasi ilmiah untuk pengukuhan sebagai profesor ITS, Haryo pun menggagas inovasi yang mampu mengatasi kedua masalah tersebut. Ia menciptakan struktur pelindung pantai ramah lingkungan bernama Hexareef. Yakni merupakan batuan pemecah gelombang berbentuk segi enam yang ditanamkan vegetasi terumbu karang buatan di permukaannya.

"Di tiap sisi juga dilengkapi beberapa lubang untuk memudahkan sirkulasi arus gelombang laut sehingga tidak merusak struktur," imbuhnya.

Lebih lanjut, lelaki berkacamata ini

menyebutkan bahwa batuan tersebut memiliki diameter 60 sentimeter dengan tinggi 80 sentimeter. Dalam aplikasinya, struktur pemecah gelombang itu disusun terendam di bawah permukaan air laut. Posisi batuan dipasang sejajar satu sama lain hingga mencapai panjang kurang lebih 50 - 100 meter.

Tidak hanya dimanfaatkan sebagai pemecah gelombang, Hexareef juga bermanfaat sebagai salah satu objek wisata bahari. Hal ini disebabkan karena

terumbu karang yang ada di permukaan batuan memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat mata para pengunjung.

"Suasana saat sunset dan sunrise bersama dengan deburan ombak pun semakin menambah keindahan pantai," beber pengajar di Laboratorium Teknik Pantai dan Pelabuhan, Departemen Teknik Kelautan ITS ini.

Sejalan dengan hal tersebut, inovasi yang merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs) poin 14 terkait menjaga ekosistem laut ini pun sudah diimplementasikan di beberapa lokasi.

Haryo menyebutkan jika salah satunya ada di Desa Tlangoh, Kabupaten Bangkalan, Madura dan di Papua Paradise Eco-Resort, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di dua lokasi itu, adanya Hexareef mampu meningkatkan pendapatan dari lokasi wisata bahari serta dapat memperbaiki kembali garis pantai yang sebelumnya terkikis. (nei,ist/dya)



Prof Ir Haryo Dwito Armono
ST MEng PhD IPM ASEAN Eng

Foto-Foto: Humas ITS



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Jajanan Korea yang Cocok untuk Wisatawan Muslim

Bagi umat Muslim, memilih makanan halal merupakan aspek penting dalam menjalankan keimanan. Ketika berwisata ke Korea Selatan, yang mayoritas penduduknya non-Muslim, kesadaran akan pentingnya memilih jajanan halal menjadi sangat krusial. Banyak makanan jalanan Korea yang mengandung bahan non-halal seperti daging babi atau kaldu hewani yang tidak disembelih sesuai syariat, sehingga perlu selektif dalam memilih.

Untungnya, Korea semakin ramah bagi wisatawan Muslim dengan menghadirkan lebih banyak jajanan halal dan restoran bersertifikat. Kesadaran ini tidak hanya membuat wisatawan merasa aman, tetapi juga membuka ruang untuk menikmati kekayaan kuliner Korea tanpa rasa khawatir. Berikut ini adalah lima jajanan Korea yang lezat dan bisa ditemukan dalam versi halal.

Tteokbokki

Tteokbokki adalah jajanan jalanan paling populer di Korea, terbuat dari kue beras yang kenyal dan dimasak dalam saus gochujang pedas manis. Umumnya, kaldu dasar tteokbokki mengandung bahan dari ikan atau daging yang belum tentu halal.

Namun, kini banyak pedagang, terutama di daerah wisata seperti Myeongdong dan Itaewon, yang menyediakan tteokbokki halal dengan kaldu sayuran atau seafood. Versi ini bebas dari bahan non-halal dan tetap menawarkan rasa autentik yang menggoda lidah. Tidak heran jika tteokbokki menjadi makanan wajib bagi wisatawan Muslim yang berkunjung ke Korea Selatan.

Hotteok

Disadur dari The National News, Hotteok menjadi salah satu jajanan yang paling dicari umat Muslim saat berkunjung ke Korea. Panekuk Korea ini digoreng dengan isian manis seperti gula merah, kacang, dan kayu manis. Beberapa varian modern juga diisi dengan biji-bijian, japchae, bahkan isian gurih seperti daging.

Hotteok halal yang hanya menggunakan bahan dasar tepung dan gula bisa dengan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional seperti Namdaemun. Tekstur renyah di luar dan lembut di dalam membuatnya sangat pas dinikmati saat udara dingin. Aromanya yang menggoda juga sering menjadi penarik perhatian wisatawan asing yang baru pertama

kali mencobanya.

Bungeoppang

Bungeoppang adalah jajanan berbentuk ikan yang umumnya diisi dengan pasta kacang merah manis. Versi halalnya banyak tersedia karena tidak mengandung daging. Kini, bungeoppang hadir dalam berbagai isian seperti custard, ubi manis, krim keju, dan bahkan es krim, yang tetap aman untuk Muslim.

Dikutip dari Korea Times, 25 Desember 2025 adalah satu tempat terkenal yang menjual bungeoppang adalah Chonggakne Bungeoppang di Pasar Gwangjang, Seoul. Inovasi modern juga bisa ditemukan di kafe seperti CHILDISH dan Bboongeo Dang, yang menyajikan varian kekinian dengan topping seperti mentega asin dan keju mozzarella.

Gyeranppang

Gyeranppang adalah roti berbentuk muffin yang di atasnya diberi satu butir telur utuh. Jajanan ini pertama kali muncul di dekat Universitas Inha pada 1984 dan kini menjadi salah satu ikon musim dingin di Korea.

Karena terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung, susu, telur, dan terkadang keju, gyeranppang menjadi pilihan yang relatif aman bagi Muslim, asalkan tidak ditambahkan topping daging yang tidak halal. Tekstur lembut dan rasa gurih-manisnya menjadikannya camilan yang ideal untuk dinikmati sambil berjalan-jalan di kota.

Eomuk

Eomuk atau odeng adalah kue ikan yang ditusuk dan direbus dalam kaldu panas. Meskipun enak, Muslim perlu memastikan bahwa kaldu dan bahan baku eomuk berasal dari sumber yang halal.

Di kawasan Islam Street, Itaewon, tersedia restoran halal yang menyajikan eomuk tanpa bahan mencurigakan. Disajikan bersama secangkir kecil kaldu, eomuk sangat cocok untuk menghangatkan tubuh saat musim dingin. Selain itu, beberapa tempat menyajikan eomuk dalam suasana lebih modern.

Bulgogi

Bulgogi terbuat dari irisan daging sapi yang dimarinasi dalam campuran seperti kecap asin dan jus buah pir sampai bumbu meresap. Setelahnya, irisan daging dipanggang hingga matang.

Karena dimarinasi terlebih dulu, cita rasa bulgogi sangat kaya dan nikmat. Dan ini yang menjadikannya sebagai salah satu makanan Korea terpopuler.

Japchae

Makanan Korea satu ini cukup mirip dengan masakan Indonesia, yaitu japchae. Japchae terbuat dari bihun yang ditumis dengan irisan daging sapi, aneka sayuran seperti bawang bombay, wortel, daun bawang, serta dibumbui dengan kecap asin. Rasanya gurih manis berpadu dengan tekstur bihunnya yang lembut dan sedikit kenyal. Japchae termasuk hidangan penting di Korea pada saat acara atau pesta khusus. Makanan ini kerap disajikan sebagai lauk maupun hidangan utama.

Bibimbap

Bibimbap artinya nasi campur dalam bahasa Korea. Sesuai namanya, hidangan ini terdiri dari nasi yang diberi topping telur, daging sapi, berbagai sayuran yang telah dibumbui dan tumis, dan gochujang. Sayuran yang biasa digunakan, seperti mentimun, wortel, lobak, jamur, tauge, dan bayam.

Twigim

Di Korea juga ada yang jual gorengan lho, tapi namanya twigim. Twigim dibuat dengan membalut bahan dengan tepung lalu digoreng sampai renyah. Gorengan khas Korea ini sebenarnya lebih mirip dengan tempura asal Jepang. Bahan yang biasa digunakan untuk twigim, yakni cumi-cumi, udang, cabai hijau, ubi, pangsit, bihun bumbu digulung nori (gimmari), hingga aneka sayuran yang mirip dengan bakwan. (nei,ist/dya)



Kegiatan Dunia (dari Hal 1)

Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) periode kuartal I-2025. Ini dicerminkan dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada kuartal I-2025 sebesar 7,63%. Melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 12,46% dan kuartal I-2024 yaitu 14,11%.

Bahkan SBT sebesar 7,63% adalah yang terendah sejak kuartal I-2021. Artinya, paling rendah dalam hampir 3 tahun terakhir.

Kalau mengeluarkan masa pandemi Covid-19 yang begitu ekstrem, SBT malah jadi yang terendah sejak kuartal IV-2018.

"Kinerja sejumlah Lapangan Usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi yaitu LU Jasa Keuangan diikuti LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor. Hal ini sejalan dengan musim panen pada daerah lumbung pangan nasional serta peningkatan aktivitas pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri," sebut laporan BI dikutip Minggu (27/4/2025).

Adapun kapasitas produksi terpakai pada kuartal I-2025 tercatat sebesar 73,25%. Meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 72,91% tetapi lebih rendah dari kuartal I-2024 yakni 73,61%.

"Peningkatan tersebut terutama didorong oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum juga tetap dalam kondisi baik, khususnya pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah," lanjut laporan BI.

Meski begitu, dunia usaha memperkirakan kegiatan pada kuartal II-2025 akan membaik. SBT diperkirakan naik menjadi 15,35%.

Jika terwujud, maka SBT akan menjadi yang tertinggi sejak kuartal II-2024 atau setahun.

"Kegiatan usaha diprakirakan meningkat terutama bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih mendukung, ketersediaan sarana produksi dan kapasitas penyimpanan, serta permintaan yang terjaga," imbuh laporan BI.

Rekrutmen Melambat, Upah Stagnan

Pelemahan kegiatan dunia usaha pada kuartal I-2025, yang mencatat laju pertumbuhan terendah dalam 3 tahun, berimbas pula pada tingkat rekrutmen tenaga kerja di Tanah Air yang lesu.

Hal itu ditunjukkan dalam hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilansir oleh Bank Indonesia hari ini.

Realisasi rekrutmen tenaga kerja di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 menyentuh level terendah dengan pertumbuhan hanya 0,97%.

Bila melacak ke belakang, angka itu menjadi pertumbuhan kuartal pertama yang terendah sejak pandemi merebak pada tahun 2020. Sebagai perbandingan, pada kuartal 1-2020, rekrutmen tenaga kerja turun alias terkontraksi hingga 1,13%.

Walau begitu, bila dibanding kuartal sebelumnya, tingkat rekrutmen tenaga kerja pada tiga bulan pertama tahun ini sedikit lebih baik. Pasalnya, pada kuartal IV-2024, rekrutmen tenaga kerja juga rendah yakni hanya tumbuh 0,86%, terendah sejak akhir 2022.

Melihat lapangan usaha, terlihat beberapa sektor mencatat penurunan rekrutmen terindikasi dari pertumbuhan yang terkontraksi pada kuartal satu.

Di antaranya adalah, sektor konstruksi (-0,31%), pertanian, kehutanan dan perikanan (-0,14%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-0,01%), pertambangan dan penggalian (-

0,1%), industri tekstil dan pakaian jadi (-0,09%), industri alat angkutan (-0,13%).

Sementara yang masih tumbuh lumayan di antaranya industri makanan dan minuman (+0,38%), sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil motor (+0,67%), industri jasa keuangan (+0,39%), lalu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (+0,12%).

Hasil survei juga mendapati, pertumbuhan upah para pekerja di Indonesia juga melambat pada semester 1-2025. Laporan yang sama mencatat, pada separuh pertama tahun ini, Saldo Bersih (SB) pertumbuhan upah hanya naik 34,91%.

Angka itu menjadi yang terendah bila dibandingkan semester 1 pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini menjadi yang terendah sejak 2022 lalu.

Sementara bila dibandingkan semester II-2024, laju perkembangan upah pekerja membaik karena pada semester sebelumnya hanya tumbuh 12,96%.

Penting digarisbawahi, bahwa hal

tersebut seringkali dipengaruhi oleh pola musiman di mana pembaharuan tingkat upah di banyak sektor usaha umumnya dilakukan pada awal tahun. Musim panen dan musim tanam juga mempengaruhi pola musiman.

Pada separuh pertama tahun ini, sebanyak 1,58% pekerja mengalami penurunan upah, lebih banyak dibanding semester sebelumnya yang cuma 1,08%. Sementara mayoritas pekerja upahnya tetap dengan proporsi mencapai 61,92%.

Pekerja yang mengalami kenaikan upah pada semester pertama tahun ini mencapai 36,49%, lebih rendah dibanding semester 1-2024 yang mencapai 40,3%. Malah pada semester 1-2023, pekerja yang mendapatkan kenaikan upah mencapai 43,06%.

Sedangkan penurunan upah terbesar dialami oleh pekerja di sektor konstruksi (6,54%), penyediaan akomodasi dan makan minum (3,99%), lalu sektor pertambangan dan penggalian (3,6%), juga sektor real estat (1,14%).

Gambaran muram perkembangan rekrutmen tenaga kerja, beserta pertumbuhan upah yang melemah itu sejalan dengan hasil survei konsumen beberapa waktu lalu. (wid, rls, bi, ist, ant, blo/dya)

Mendikdasmen Siap Perbaiki Sistem Pembelajaran

BANK Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk 2025, turun dari prediksi sebelumnya sebesar 5 persen.

Penyesuaian ini dilakukan seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang berdampak terhadap kepercayaan investor dan kinerja perdagangan Indonesia.

Hal itu dimuat dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Dalam laporannya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan rata-rata berada di angka 4,8 persen hingga 2027.

"Ketidakpastian atas kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas akan berdampak pada terms-of-trade Indonesia dan kepercayaan investor," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut dikutip Minggu (27/4/2025).

Dalam aspek fiskal, Bank Dunia menyoroti rasio pendapatan pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada 2024 hanya sebesar 12,7 persen, terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah.

Sementara defisit fiskal diproyeksikan meningkat menjadi 2,7 persen dari PDB pada 2025.

"Penutupan celah penerimaan pajak akan memperluas ruang fiskal untuk mendanai Visi Indonesia 2045," kata Bank Dunia dalam laporannya.

Di sisi eksternal, defisit transaksi berjalan Indonesia meningkat menjadi 0,6 persen dari PDB pada 2024, dan diproyeksikan melebar lagi menjadi 1,7 persen pada 2027.

Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 2,3 persen hingga Maret 2025, akibat tekanan dari pembayaran utang luar negeri dan aliran keluar dividen.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi di bawah ambang psikologis 5 persen.

Bank Dunia memproyeksikan, besarnya pengeluaran pemerintah Indonesia, digunakan untuk mengakomodasi program-program prioritas baru. Hal ini dikhawatirkan bakal mendorong defisit fiskal melonjak 2,7 persen dari PDB.

Sementara, menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran harus di bawah 3 persen. Kalau lebih, pemerintah bisa disebut melanggar Undang-undang yang berisiko serius.

Untuk menggerus defisit, caranya yaitu tadi, menarik utang baru lewat jor-joran menerbitkan surat berharga negara (SBN). Apakah

utang pemerintah tak ada batasnya? Ada. Masih menurut UU Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB maksimal 60 persen.

Kalau benar kejadian, utang membubung hingga rasionya terhadap PDB di atas 40 persen, memang masih aman menurut aturan. Karena masih di bawah 60 persen. Namun, bukan perkara enteng bagi pemerintahan selanjutnya. Karena haus menanggung beban utang serta bunganya.

Tahun ini saja, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun serta bunga utang sebesar Rp552 triliun. Kalau ditotal mencapai Rp1.352 triliun. Setara 37 persen dari total APBN 2025 sebesar Rp3.600 triliun. Walah.

Di sisi lain, setoran pajak pun memprihatinkan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan pajak hingga Maret 2025 mencapai Rp322,6 triliun, setara 14,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi periode tahun sebelumnya atau Maret 2024, penerimaan pajak anjlok 18,1 persen. Di mana, setoran pajak hingga Maret 2024 mencapai Rp393,91 triliun, setara 19,81 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp1.988,88 triliun. (blo, wid, rls, ist/dya)

Pertemuan Rahasia Trump-Zelensky di Vatikan: Siapkan Sanksi untuk Putin

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Zelensky melakukan pertemuan rahasia sebelum proses pemakaman Paus Fransiskus dimulai Sabtu (26/4/2025) pagi waktu setempat. Trump kemungkinan akan memberikan sanksi baru terhadap Rusia.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat bertemu 15 menit saat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Sabtu (26/4/2025). Kedua-dua bertemu secara singkat di sela-sela acara, menjadi kontak langsung pertama setelah ketegangan yang memuncak di Gedung Putih pada Februari lalu.

Usai melakukan pertemuan, Trump menyatakan kemungkinan akan memberikan sanksi baru terhadap Rusia. Hal ini karena Trump mempertanyakan sikap Presiden Rusia Vladimir Putin yang tidak serius ingin 'menghentikan perang' dengan Ukraina.

"Tidak ada alasan bagi Putin untuk menembakkan rudal ke wilayah sipil, kota-kota besar dan kecil, selama beberapa hari terakhir," tulis Trump di Truth Social, Minggu (27/4/2025).

"Itu membuat saya berpikir bahwa mungkin dia tidak ingin menghentikan perang, dia hanya mengadu domba, dan harus ditangani dengan cara yang berbeda, melalui 'Sanksi Perbankan' atau 'Sanksi Sekunder?'" Terlalu banyak orang yang sekarat!!!" kata Trump.

Gedung Putih buka suara, bahwa pertemuan Trump dan Zelenskyy mengenai diskusi yang sangat produktif. Namun sayangnya, ia tidak merinci tentang apa yang didiskusikan dan apa hasilnya.

Zelensky mengatakan pertemuan dengan Trump sangat simbolis yang berpotensi menjadi sejarah apabila menghadirkan suatu pencapaian bersama," terang Zelensky.

Dalam postingannya di Truth Social pada hari Sabtu, Trump mengatakan bahwa Rusia mencuri Krimea dari Ukraina, sebuah pengakuan yang jarang terjadi dari seorang presiden AS bahwa Rusia mencaplok wilayah tersebut secara ilegal.

Trump membidik mantan Presiden AS Barack Obama dan menyatakan



Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Basilika Santo Petrus, Vatikan. (Ukrainian Presidential Press Office)

bahwa ia "memungkinkan Rusia mencuri Krimea dari Ukraina bahkan tanpa tembakan."

Kremlin Akui Libatkan Tentara Korut

Kremlin mengklaim bahwa pasukannya telah sepenuhnya mengusir militer Ukraina dari wilayah Kursk pada Sabtu (26/4/2025) setelah pertempuran sengit selama beberapa bulan terakhir.

Untuk pertama kalinya, Rusia juga secara resmi mengakui kehadiran ribuan tentara Korea Utara yang membantu operasi militer mereka di wilayah tersebut.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, dalam laporan kepada Presiden Vladimir Putin, menyatakan bahwa Oblast Kursk telah sepenuhnya dibebaskan dari pasukan Ukraina.

Pernyataan ini disampaikan

melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dan dilaporkan oleh media pemerintah Rusia, TASS.

"Saya ingin secara khusus mencatat partisipasi prajurit Republik Rakyat Demokratik Korea dalam pembebasan wilayah perbatasan Wilayah Kursk yang sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara negara kita memberikan bantuan yang cukup besar dalam menghancurkan kelompok tempur tentara Ukraina yang telah melancarkan serangan," kata Gerasimov, seperti dikutip TASS.

Menurut laporan Interfax, Gerasimov juga memuji "ketabahan dan kepahlawanan" tentara Korea Utara, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 11.000 personel, berdasarkan estimasi dari pihak Ukraina dan Korea Selatan.

Di sisi lain, pihak Ukraina membantah klaim Rusia. Pemerintah di Kyiv menyatakan bahwa meskipun pasukan mereka menghadapi situasi sulit di Kursk, mereka masih mampu bertahan dari pengepungan dan bahkan memukul mundur beberapa serangan darat Rusia. (rtr, tass, iat, wid/dya)

Survei 100 Hari Trump Menjabat: Warga Sebut 'Menakutkan'

SEJUMLAH jajak pendapat nasional menunjukkan kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump terus menurun, bahkan di antara pendukung Partai Republik sendiri.

Survei dirilis pekan ini dalam rangka 100 hari masa jabatan kedua Trump di Gedung Putih. Ia resmi menjadi presiden sejak pelantikan 20 Januari lalu.

Sebuah survei yang dilakukan Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan hanya 24% warga AS yang percaya Trump berfokus pada prioritas yang tepat sebagai presiden.

Sebaliknya, mayoritas responden menggambarkan masa jabatan keduanya sejauh ini sebagai "menakutkan".

Penilaian serupa muncul dalam jajak pendapat New York Times/Siena College. Mengutip Guardian, lebih dari separuh pemilih menyatakan Trump telah melampaui batas kewenangannya, sementara 59% menggambarkan periode ini sebagai masa yang penuh kecemasan.

Hanya 42% pemilih yang menyetujui kinerjanya secara keseluruhan, dan tingkat persetujuan di kalangan pemilih

independen bahkan lebih rendah, yakni 29%.

Survei ini juga menunjukkan pergeseran sikap di kalangan Partai Republik. Meski mayoritas tipis, 54%, dari pemilih Republik masih percaya Trump berfokus pada isu yang benar, sisanya mengkritik arah prioritas yang diambil.

Di kalangan pemilih independen, hanya 9% yang menilai Trump fokus pada isu yang tepat.

Dalam bidang ekonomi, biasanya menjadi kekuatan bagi presiden dari Partai Republik, Trump mencatatkan skor buruk.

Survei Times menunjukkan hanya 43% pemilih menyetujui kebijakan ekonominya, menurun tajam dibandingkan 64% pada masa jabatan pertama.

Selain itu, setengah dari responden tidak setuju dengan kebijakan perdagangan, dan 61% menilai presiden seharusnya tidak memiliki wewenang mengenakan tarif tanpa persetujuan Kongres.

Kebijakan imigrasi Trump juga mendapat kritik luas. Jajak pendapat Washington Post-ABC-Ipsos menemukan 53% warga AS tidak setuju dengan cara Trump menangani isu imigrasi, naik

dibandingkan Februari lalu.

Penolakan ini meluas di seluruh spektrum politik, termasuk 56% dari pemilih independen dan 11% dari pendukung Partai Republik.

Isu deportasi terhadap imigran legal yang terlibat dalam protes pro-Palestina juga memperburuk citranya.

Sebanyak 63% responden, termasuk 40% dari Partai Republik, menilai presiden tidak seharusnya memiliki kewenangan untuk mendeportasi warga berstatus legal hanya karena perbedaan pendapat.

Generasi muda Amerika, terutama Generasi Z, menunjukkan ketidakpuasan paling besar.

Survei NBC Stay Tuned mencatat 69% responden Gen Z tidak setuju dengan kebijakan Trump terkait ekonomi dan biaya hidup. Mereka mengeluhkan sulitnya membeli rumah, kenaikan harga sewa, dan kekhawatiran terhadap inflasi.

Di tengah kritik yang terus berkembang, survei Fox News—yang biasanya condong ke kubu konservatif—bahkan mencatat hanya 38% warga AS yang menyetujui kinerja Trump dalam ekonomi, dengan 58% menolak cara dia menangani inflasi. (nyt, ist/dya)